

DEFISIT APBD REMBANG 2023 BERPOTENSI MEMBENGKAK MENJADI RP 290 MILIAR



Sumber gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2023/07/03/Kas-daerah-DPRD-Rembang-1803122044.png>

Isi Berita:

REMBANG - Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rembang 2023 berpotensi membengkak menjadi sekitar Rp 290 miliar.

Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa pos anggaran yang belum dikalkulasikan dalam waktu satu tahun.

Untuk diketahui, sebelumnya baik Dewan maupun Sekda menuturkan defisit APBD Rembang masih di angka sekitar Rp 143 miliar.

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang Puji Santoso mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, APBD Rembang diketahui berpotensi memiliki defisit diatas angka Rp 143 miliar.

Sebab, saat ini masih terdapat beberapa pos anggaran yang belum dikalkulasikan dalam waktu satu tahun.

Ia mencontohkan, seperti pembayaran Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang baru dianggarkan 10 bulan dan kegiatan lainnya.

"Kalau itu dimasukkan semua ya bisa mencapai 200 miliar defisitnya," ujarnya.

Meski demikian, Puji belum bisa mengonfirmasi secara resmi terkait kepastian angka tersebut.

Sebab, pihak DPRD masih menunggu dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rencananya, dokumen tersebut akan disampaikan kepada legislatif pada Rabu (30/8) ini. Tak hanya itu, angka defisit tersebut dimungkinkan masih bisa bertambah apabila potensi pendapatan Pemkab Rembang tidak terpenuhi.

"Bisa tambah Rp 91,7 miliar (total defisit) menjadi Rp 290 miliar. Itu masih perkiraan. Saya cuma bisa memastikannya lewat dokumen KUA-PPAS dan pembahasannya," jelasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait angka defisit, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Fahrudin mengaku belum bisa memastikan secara pasti.

Kini, pihaknya masih mencoba mencocokkan kembali keseluruhan angka defisit APBD 2023.

"Itu nanti coba kami cocokkan kembali. Kami segera menyampaikan RKUA kepada dewan. Karena kami mau menyusun RKUA nya dulu," ujarnya. (vah/khim)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/692896677/duh-defisit-apbd-rembang-2023-berpotensi-membengkak-menjadi-rp-290-miliar-ini-penyebabnya>, "Duh!! Defisit APBD Rembang 2023 Berpotensi Membengkak Menjadi Rp 290 Miliar, Ini Penyebabnya", tanggal 30 Agustus 2023.
2. <https://muria.suamerdeka.com/muria-raya/079990941/refokusing-dampak-carut-marut-apbd-rembang-meluas-anggaran-pokir-dan-kegiatan-dewan-hilang-miliaran>, "Refokusing Dampak 'Carut-Marut' APBD Rembang Meluas, Anggaran Pokir dan Kegiatan Dewan Hilang Miliaran", tanggal 30 Agustus 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos LainLain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.³
- Dalam APBD, Pemda dapat merencanakan defisit atau surplus APBD. Pada kenyataannya, di dalam dokumen APBD seringkali terjadi defisit daerah. Defisit daerah dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh pemda yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf>

⁴ *Ibid*

